



Kunjungan KBP Drs. Siswandi ke Afrika Barat

BLOKIR JALUR PARA SINDIKAT

Kejahatan lintas negara diyakini mengancam eksistensi ketahanan dan keamanan semua bangsa, sehingga patut diduga kejahatan narkoba yang masuk dalam kejahatan lintas negara tersebut didanai oleh sindikat kejahatan Internasional dengan dukungan dana yang besar, SDM profesional dan teknologi tinggi.

HAL ini diungkap Kepala Unit II Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Drs Siswandi usai MoU between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Nigeria on the Cooperation in Combating Illicit Production, Manufacture and Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Its Precursors di Abuja, Nigeria, pertengahan Mei lalu.

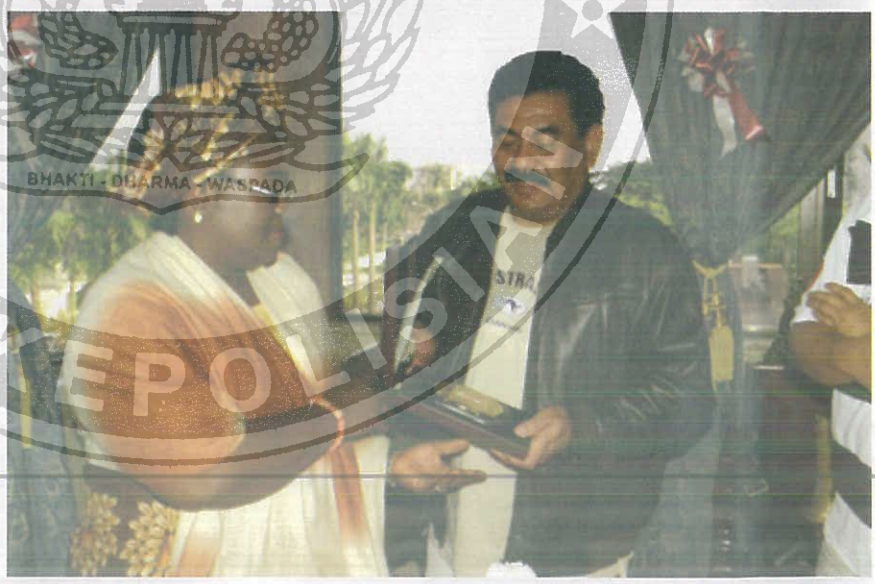
"Kejahatan lintas negara akibat arus globalisasi, yang telah mendorong interaksi antarmanusia di seluruh dunia yang melewati batas yurisdiksi antar negara, sehingga mendorong mobilitas penduduk dunia yang semakin tinggi," katanya.

Selain itu, kata Siswandi, globalisasi telah memberikan ruang bagi setiap warga negara dunia untuk berinteraksi dan bertransaksi sehingga tidak jarang terjadi transformasi nilai-nilai budaya barat ke dalam budaya negara-negara dunia ketiga/ negara sedang berkembang termasuk Indonesia.

Sebagai negara yang telah mengintegrasikan diri dalam pusaran arus globalisasi, Indonesia telah menjadi wilayah transit dan bahkan wilayah tujuan bagi lalu lintas



DELEGASI RI yang diwakili oleh DIT IV Bareskrim Polri Deplu serta KBRI saat membahas draft MoU dengan seluruh pejabat NDLEA



DELEGASI RI yang diwakili oleh DIT IV Bareskrim Polri saat menerima cinderamata dari NDLEA (National Drugs and Law Enforcement Agency)

mobilitas manusia di seluruh jagad raya.

"Dampak negatif dari masuknya Indonesia dalam arus globalisasi adalah menguatnya kualitas dan kuantitas kejahatan yang terjadi di Indonesia, mulai dari kejahatan

konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, sampai dengan kejahatan yang berimplikasi kontijensi," terangnya.

Salah satu jenis kejahatan transnasional yang saat ini sedang diperangi oleh seluruh negara termasuk

SUASANA wawancara di ruangan Ka. Unit II Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri Drs Siswandi dengan Konsulat Jenderal Nigeria Mr. S. U. Jibrilla.



Indonesia adalah kejahatan peredaran Narkoba antar Negara.

Menurutnya, peredaran narkoba antarnegara telah menjadi perhatian dunia Internasional sejak tahun 1909 ketika diselenggarakan konferensi internasional Shanghai China untuk mencegah peredaran narkoba antarnegara yang dinilai telah merusak generasi muda di seluruh dunia.

"Kasus-kasus peredaran Narkoba yang telah menjadi jaringan / sindikat terorganisir banyak diungkap di berbagai negara. Di Amerika Selatan, perang melawan penyalahgunaan narkotika, psicotropika dan zat adiktif lainnya dikumandangkan oleh Kolumbia, Brazil, Argentina, Meksiko, dan Chile. Tidak hanya itu, AS juga telah melakukan berbagai upaya bilateral dan multilateral dalam menangani peredaran Narkoba di wilayahnya yang terkait dengan jaringan narkoba internasional," katanya.

Asean sendiri, katanya menggolongkan kejahatan transnasional ke dalam 8 (delapan) bentuk, yakni Terrorism, Illicit Drug Trafficking, Arms Smuggling, Sea Piracy, Money Laundering, Trafficking in Persons (Women, Children, illegal Immigrants), Cyber Crimes, International Economic Crimes.

"Ttulah mengapa kejahatan lintas Nngara telah mengancam eksistensi ketahanan dan keamanan semua bangsa, sehingga patut diduga kejahatan Narkoba telah didanai oleh sindikat kejahatan internasional dengan dukungan dana yang besar, sumber daya manusia (SDM)

professional dan teknologi yang sangat maju," ungkapnya.

Begitu hebatnya peredaran narkoba, sampai . UNODC, World Drug Report (2005) diperkirakan nilai perdagangan Narkoba di dunia tahun 2003 telah mencapai US\$322 milyar.

Sementara pada tingkat regional di kawasan Negara Asia khususnya yang tergabung dalam Asean and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs (ACCORD), peredaran gelap narkoba memberikan kontribusi besar baik secara global maupun regional karena jaringannya

yang cukup luas yaitu peredaran gelap dari dan ke wilayah Afrika Barat (West Africa).

"Jaringan sindikat narkoba Afrika Barat berkembang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat sindikat Afrika Barat dikenal sebagai organisasi transnasional yang berbahaya dengan mem- perdagangkan narkoba golongan satu, yaitu kokain dan heroin," papar Kombes Siswandi..

ANCAMAN GLOBAL

Kasus penyalahgunaan Narkoba



DELEGASI RI yang diwakili oleh DIT IV Narkoba Bareskrim Polri KBP Drs Siswandi dan KBP Drs Iwan Hari Sugiarto saat berfoto bersama Polisi Nigeria.

DAFTAR HUKUMAN MATI

NO	NAMA	WARGANEGARA	WAKTU & TKP	BARANG BUKTI	KET
01	MIRKE	NIGERIA	19 JANUARI 2008, DEPAN RESTORAN AW PANTAI CARNAVAL ANCOL JAK-UT	71 GR HEROIN	
02	ABDOULE BOJANG	GAMBIA	19 FEBRUARI 2008 HALAMAN PARKIR APARTEMEN GADING MEDITERANIA JAK-UT	52 GR HEROIN	
03	PO GUDISON JUFFRY	NIGERIA	19 FEBRUARI 2008, HALAMAN PARKIR APARTEMEN GADING MEDITERANIA JAK-UT	103 GR HEROIN	
04	PRINCE HENRY	LIBERIA	1 APRIL 2008, JL RAYA KEBON JERUK RAWABELONG NO.35 JAK-BAR	4 GR HEROIN	
05	UMELO IHEANYI als. IFAN	NIGERIA	1 APRIL 2008, JL RAYA KEBON JERUK RAWABELONG NO.35 JAK-BAR	4 GR HEROIN	
06	LAWRENCE EREREBOA OTTAH	NIGERIA	09 MEI 2008 JL. Amda KS Tubun depan Hotel Kalisma Tanah Abang Jakarta Pusat.	6 GR HEROIN	
07	JONAH IFEANYI CHUKWU	NIGERIA	09 MEI 2008 JL. Amda KS Tubun depan Hotel Kalisma Tanah Abang Jakarta Pusat.	60,5 GR SHABU 26 GR HEROIN	
08	IFEANYI NICHOLAS	NIGERIA	09 MEI 2008 JL. Amda KS Tubun depan Hotel Kalisma Tanah Abang Jakarta Pusat.	60,5 GR SHABU 26 GR HEROIN	
09	LUCKY AMACHA	NIGERIA	24 JUNI 2008 JL. WAHID HASYIM TANAH ABANG J JAK-PUS	20 GR HEROIN	
10	BETH ONYE OJU als. BOS als. BONI	NIGERIA	15 AGUSTUS 2008 PERUM TAMAN WASPADA KEDAMAIAN ASRI NO. 11 TJ. KARANG TIMUR BANDAR LAMPUNG	93 GR HEROIN 45 GR SHABU	
11	AJAH JOSEPH als. MR. 20 als. ANYIM	NIGERIA	20 AGUSTUS 2008 DI DEPAN MC. DONALD TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL	42 GR HEROIN 43 GR SHABU	
12	BONI ALS BETH ONYE OJU	NIGERIA	PERUM TAMAN KEDAMAIAN ASRI NO. 11 TJ. KARANG TIMUR BANDAR LAMPUNG	93 GR HEROIN 45 GR SHABU	
13	JOSEPH IGWEBUIKE	NIGERIA	JL. MANDOR HALIM KEMBANGAN CENTRAL JAKARTA	25 GRAM HEROIN	
14	JHON OSUODY	NIGERIA	PARATAMA RESTAURANT FIRST FLOOR CENTRAL JAKARTA	439 GRAM HEROIN	
15	CRISTOPHE KABLAN	NIGERIA	PARKIRAN HOTEL MAHARANI JL. MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN	3,5 GRAM GANJA	
16	EDWIN ROBERT	NIGERIA	DEPAN UNIVERSITAS BINA NUSANTARA JL. KEBON JERUK RAYA KEL. PALMERAH KEC. PALMERAH JAK BAR	40 GRAM HEROIN	

yang terjadi di Afrika Barat dimulai sejak tahun 1930-an, kemudian tahun 1980-an jaringan sindikat narkoba Afrika Barat menyebar ke seluruh dunia dan menjadi ancaman global. Menurut hampir semua catatan kepolisian di Afrika United Nations, Office on Drugs and Crime, Transnational Organized Crime in West African Region, United Nations, New York, 2005.

Jaringan ini dipimpin sindikat yang terdapat di beberapa daerah Nigeria, kemudian menyebar ke negara seperti Ghana dan Sierra Leone. Penyebaran ini dilakukan oleh jaringan sindikat Narkotika dari Nigeria yang mencari lokasi-lokasi operasi baru.

Menurut Siswandi hampir seluruh kokain yang dibawa ke Afrika Barat adalah hasil pengembalian ekspor ke tujuan yang lain, terutama Spanyol, Portugal dan Inggris.

"Menurut laporan dari United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) pada tahun 2000-2004, lebih dari 1,4 ton kokain yang dimasukkan ke Afrika Barat atau dari Afrika Barat ke Eropa, tidak termasuk hasil tangkapan sebanyak 2,29 ton ke Afrika



DELEGASI RI yang diwakili oleh Dit IV Narkoba Bareskrim Polri KBP Drs. Siswandi dan KBP Iwan Hari Sugiarto berfoto di perkampungan di Nigeria.

Barat dan 7,5 ton dari Afrika Barat ke Eropa," katanya.

Sebelumnya peredaran kokain dunia datang hanya dari tiga negara, yaitu Kolumbia, Peru, dan Bolivia. Secara tradisional, bandar Kolumbia mendominasi penjualan kokain antar Negara, menyelundupkan Narkoba ke pasar-pasar yang menggiurkan via Amerika Tengah dan Karibean menuju Amerika Serikat dan menyeberangi lautan Atlantik ke Eropa. Saat ini peredaran sudah masuk melalui Afrika Barat. Pada tahun 2005-2007 sebanyak 33 ton kokain dikirim ke perbatasan untuk Eropa melalui Afrika Barat.

Selain kokain, kejahatan terorganisir penyalahgunaan Narkoba jaringan Afrika Barat juga memperdagangkan secara gelap heroin ke seluruh benua di dunia, yaitu Amerika, Eropa dan Asia termasuk negara Asean seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Myanmar, dan Laos

KEGIATAN TIM

Dalam rangka pembahasan dan finalisasi draft MoU between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Nigeria on the Cooperation in Combating Illicit Production, Manufacture and Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Its Precursors, delegasi Indonesia yang terdiri dari unsur Bareskrim-Polri dan Dit. Afrika, Kemlu telah mengadakan kunjungan ke Nigeria pada 16-20 Juni 2010.

Sesuai rencana awal, kunjungan ini akan dipimpin oleh Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama - Badan



DPO WEST AFRIKA

 SAGAI Als SHAGGY DPO	 JEFF YAN Als EMEKA DPO	 BEN Als CHRIS Als CROSS DPO	 MIESKE SAHERTIAN DPO	 TORE FRANCIS DPO
 OBUIAKO CHINFOU DPO <small>KABUR DARI TAHANAN KANTOR BINLADAL KUNYINGAN JAGATARA SELATAN PADA TGL 2 JANUARI 2008</small>	 CELESTINE CHIDI E DPO <small>KABUR DARI TAHANAN KANTOR BINLADAL KUNYINGAN JAGATARA SELATAN PADA TGL 2 JANUARI 2008</small>	 MADU REMIGIUS DPO <small>KABUR DARI TAHANAN KANTOR BINLADAL KUNYINGAN JAGATARA SELATAN PADA TGL 2 JANUARI 2008</small>		



Narkotika Nasional (BNN). Namun menjelang saat terakhir keberangkatan, pihak BNN membatalkan keikutsertaannya terkait dengan persiapan penyelenggaraan peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional dan untuk selanjutnya mendelegasikan pembahasan draft MoU tersebut kepada pihak Kemlu dan KBRI Abuja.

"Kemudian, tanggal 17 Juni 2010, delegasi telah mengadakan pertemuan dengan pihak Kemlu yang diketuai oleh Mr. Stevie Egurube, Direktur Konsuler, Kemlu Nigeria yang beranggotakan unsur-unsur National Drugs and Law Enforcement Agency (NDLEA) dan staf Kemlu Nigeria. Sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh KUIAI KBRI Abuja dan beranggotakan wakil-wakil dari Bareskrim-Polri, Dit. Afrika dan staf KBRI Abuja," ujar Siswandi..

Mengawali pertemuan, Mr. Stevie Egurube menyampaikan apresiasi kepada delegasi Indonesia yang secara khusus berkunjung ke Nigeria dalam rangka pembahasan dan finalisasi draft MoU termaksud.

Terkait dengan draft MoU, disampaikan bahwa inisiasi penyusunan draft MoU telah mulai dibahas oleh kedua negara sejak tahun 2003 dan ditindaklanjuti dengan serangkaian pertemuan antara pihak BNN dan NDLEA pada periode 2003-2009.

Sementara itu, KUIAI KBRI Abuja dalam sambutannya menyampaikan penghargaan atas tanggapan positif pihak Nigeria terhadap draft MoU dan kesediaannya

FOTO bersama Delegasi Indonesia (KBRI, DEPLU, Dit.IV TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri dengan Nigeria (Direktur Konsuler Kemlu Nigeria Mr. Stevie egurube dan Ketua/Pejabat NDLEA Afrika Barat).

untuk membahas dan finalisasi draft dimaksud. KUIAI RI juga menegaskan kembali perlunya segera merampungkan draft final MoU mengingat pembahasan MoU tersebut telah cukup lama dibahas oleh kedua negara dan diharapkan dapat ditandatangani pada pertemuan bilateral di sela-sela penyelenggaraan KTT D-8 yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada 4-8 Juli 2010 di Abuja, Nigeria.

Terkait dengan persiapan beberapa naskah MoU/Perjanjian yang kemungkinan dapat ditandatangani pada kesempatan KTT D-8, pihak Nigeria juga mengindikasikan kesiapannya untuk penandatanganan MoU mengenai Pembentukan Komisi Bersama. Sementara 2 (dua) draft MoU/Perjanjian lainnya, yakni MoU

Kerjasama Pertanian; serta Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dari pihak Nigeria.

"Disamping kunjungan ke Abuja, delegasi juga mengadakan kunjungan ke Lagos guna mengadakan pertemuan dengan pihak NDLEA serta mengunjungi beberapa lokasi penampungan dan rehabilitasi korban narkotika. Kunjungan lapangan ini dinilai penting sebagai wahana tukar informasi dan pengalaman mengenai cara-cara terbaik dalam penanganan korban narkob," kata Siswandi lagi..

Nota Kesepahaman antara Polri dan Kepolisian Nigeria dilakukan kedua negara mengingat jumlah warga Nigeriayang terlibat narkoba diIndonesia angkanya cukup besar. jt02



PERJALANAN YANG ANEH TAPI NYATA MENUJU NIGERIA

(Penumpang Tidak terdaftar bisa sampai tujuan).

Berangkat menuju Nigeria pada hari senin, tanggal 15 Juni 2010 jam 00.30 wib dengan menggunakan pesawat Emirate Air Line Dengan rute Jakarta – Dubai – Lagos – Abuja.

Tetapi anehnya dari Kantor Maskapai Penerbangan Emirate Air Line Menanyakan apakah penumpang atas nama Drs. Siswandi jadi berangkat ke Nigeria atau tidak, sedangkan sang penumpang atas nama Drs. Siswandi sudah mendarat di Lagos Afrika (waktu itu tidak mempunyai pemikiran apa-apa).

Namun kejadian saat akan Kembali dari Nigeria menuju Indonesia pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 saat berada di Bandara Lagos Nigeria dengan sangat terkejut sang penumpang atas nama Drs. Siswandi tidak terdaftar di penerbangan Emirate Air Line Sedangkan sang penumpang membawa bukti tiket kembali dengan cemas dan was-was sang penumpang membeli tiket baru untuk kembali ke Indonesia.

YANG UNIK TAPI NYATA

bahwa sang penumpang bisa sampai di Nigeria tanpa terdaftar di dalam list penumpang keberangkatan didalam penerbangan Emirate Air Line.



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA ON THE
COOPERATION IN COMBATING ILLICIT PRODUCTION, MANUFACTURE
AND TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES AND ITS PRECURSORS**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Nigeria (hereinafter referred to individually as "the Party" and collectively referred to as "the Parties");

that illicit production, manufacture and trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, and its precursors as well as their abuse pose a serious threat to the health, security and welfare of human beings, and adversely affect the economic, social, cultural, and political foundations of the society;

that illicit production, manufacture and trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, and its precursors pose a real danger to the stability and security of the Nations and the peoples of the two countries;

Being conscious of the mutual benefit and the importance of coordination and cooperation in combating illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors;

to enhance and strengthen closer cooperation in combating the above-mentioned crimes;

by the provisions of the International Drug Control Conventions, applicable to both Parties;

the importance of the principles of sovereignty, equality and territorial integrity; to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

agreed as follows:

**Article 1
Objective**

objective of this Memorandum of Understanding is to promote cooperation between the National Narcotics Board of Indonesia and the National Drugs Law Enforcement Agency of the Federal Republic of Nigeria to address more effectively various aspect of illicit production, manufacture and trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors.

2

Areas of Cooperation

main areas of cooperation between the Parties are as follows:

reduction as well as improving counter measures against drug supply

Taking joint measures to eliminate illicit drug supply resources

Taking measures that can limit access of the potential drug traffickers to the territories of both parties;

Collaborating on law enforcement against illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors, to suppress the illicit traffic of narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors as well as cooperation in regional and multilateral fora.

Establish and maintain channels of communication between the National Narcotics Board and the National Drugs Law Enforcement Agency to facilitate the secure and rapid exchange of information concerning all aspects in the illicit production, manufacture and trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors, including links with the criminal activities, interalia, among others:

Exchange of experiences and information on the methods and modus operandi used by drug traffickers, including new routes of illicit drugs transportation;

Exchange of information on networks and persons involved in or suspected to be involved in or prosecuted for illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances and its precursors, and

Providing information on new types of drugs and its precursors;

Cooperate with one another in conducting inquiries with respect to the illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors, concerning:

To identify the whereabouts and activities of persons suspected of being involved in illicit traffic of narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors;

The movement of proceeds of property derived from the commission of such offences.

In appropriate cases and if not contrary to domestic law, establish joint teams, taking into account the need to protect the security of persons and of operations, to carry out the provisions of this paragraph. Officials of any Party taking part in such teams shall act as authorized by the appropriate authorities of the Party in whose territory the operation is to take place, in all such cases, the Party involved shall ensure that the sovereignty of the Party on whose territory the operation is to take place is fully respected.

Develop or improve specific training programmes for its law enforcement and other personnel, including customs, charged with the suppression of illicit traffic of narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors.

Exchange of information on national legislation and judicial practices in the field of combating illicit production, manufacture and trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors

Explore other areas of common concern identified by both parties in the field of illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors.

**Article 3
Controlled Delivery**

The parties will, in accordance with national legislations and international obligations cooperate in the implementation of Controlled Delivery Techniques and other operational activities.

**Article 4
Confiscation and Sharing of Assets**

The parties shall consistent with the relevant laws of their states mutually cooperate and adopt measures as necessary to identify, freeze, seize or effect confiscation of proceeds derived from illicit drugs production, manufacture, trafficking and related money laundering and other related financial crimes.

Where confiscation of assets results from the mutual cooperation and assistance of one party to the other either as a result of joint operations or tangible and substantial assistance of a party to the other, the confiscated assets shall be shared in appropriate portion between the parties.

**Article 5
Secrecy of Information and Documents**

The information and documents obtained in accordance with this Memorandum of Understanding shall be kept confidential when so requested and be used in compliance with the purposes, determined by the providing party. The information and documents shall not be transmitted to a third party without prior written authorization from the providing party.

**Article 6
Meetings**

In order to review periodically the situation dealing with the drugs and progress made in implementation of this Memorandum of Understanding, the Parties agree to host alternatively the meetings on a necessity basis.

In order to make the meeting more effective, both Parties will establish a working group.

**Article 7
Implementing Agency**

The Competent authorities responsible for implementation of this Memorandum of Understanding are as indicated hereunder:

For the Government of the Republic of Indonesia: National Narcotics Board

For the Government of the Federal Republic of Nigeria: Nigeria National Drugs Law Enforcement Agency

Each party shall introduce a focal point, to ensure direct contacts by a written notice.

**Article 8
Amendment**

The Parties may review or amend any part of this Memorandum of Understanding by mutual consent in writing and such amendment shall come into force on such date as determined by the Parties and shall form as an integral part of this Memorandum of Understanding

**Article 9
Settlement of dispute**

Any difference or dispute arising out on the interpretation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations and/or negotiations.

**Article 10
Entry into Force, Duration and Termination**

This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing.

This Memorandum of Understanding shall remain in force for the period of 5 (five) years and shall be automatically renewed for the same period unless either Party notifies in writing through diplomatic channel of its intention to terminate this Memorandum of Understanding 6 (six) months prior to such termination.

The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any on-going programs or activities made under this Memorandum of Understanding.

Signed in Abuja on..... in 10 Articles in two original copies in Indonesian and English languages, all of them being equally authentic. In case of any discrepancy, the English text shall prevail.

For The Government of the
Republic of Indonesia

For The Government of the
Federal Republic of Nigeria



PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA LEBIH HUMANIS

Perlakuan negara terhadap pecandu narkoba kini lebih humanis, menyusul diberlakukannya UU No.35 tahun 2009. Dalam UU tersebut, pecandu kategori tertentu masuk direhab, bukan dijebloskan ke penjara.

PERLAKUAN UU tersebut disambut baik oleh Direktur Pasca Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) KBP Tamrin Dahlan dan staf Ahli BNN dr Kusman Suriakusumah, SpKI, MPH dan dr Djodi.

"Saya kira ada perubahan yang signifikan perlakuan pecandu narkoba oleh negara. Pasal pasal 54 UU itu, pecandu dan penyalaguna harus direhab. Sedangkan UU yang lama masih ada paradigma bahwa pecandu sebagai kriminal," kata KBP Tamrin Dahlan kepada Jagratara dan pendapat tersebut diamini oleh dr Djodi dan Kusman.

Oleh karena itu, kata Tarmin Dahlan, edaran Mahkamah Agung No. 4 pada April lalu kepada para hakim yang mengadili pecandu meminta agar mereka dibawa ke panti rehabilitasi bukan justeru dijebloskan ke penjara.

"Ketentuannya memang ada. Misalnya barang buktinya tidak banyak, masih muda atau sekolah dan yang bersangkutan benar-benar pecandu. Tapi, beberapa hakim sudah melaksanakan edaran tersebut. Sudah ada sekitar 15 putusan hakim yang meminta terdakwa kasus narkoba dibawa ke panti rehabilitasi," kata Tamrin Dahlan.

Secara rinci disebutkan di Kediri, Jawa Timur ada satu kasus. Bekasi ada satu. "Jakarta banyak. Ini membuktikan perlakuan negara terhadap pecandu sudah sangat humanis," tegas Tamrin Dahlan.

Merespon perubahan UU dan edaran MA tersebut, BNN pro-aktif. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan membangun fasilitas rehabilitasi, yang tempatnya dipusatkan di Lido, Sukabumi, Jawa Barat.

Sejauh ini di tempat rehabilitasi tersebut sudah delapan orang dirawat. Tiga dari Sukabumi, dua dari Jakarta dan satu pasien dari Bekasi. "Masyarakat juga harus tahu penanganan pecandukini sudah berbeda," imbuh Tamrin Dahlan.

Dalam pasal 128, kata Tamrin Dahlan, disebut juga kalau pecandu yang ditangkap polisi memiliki kartu wajib lapor

di Puskesmas, kalau ditangkap langsung direhab tidak diproses BAP.

"Polisi harus langsung membawa ke Direktorat Pasca Rehab BNN. Ketangkap sekali direhab. Dua kali di rehab dan kalau sampai tiga kali harus diproses tapi dalam masa proses itu dia harus tetap direhabilitasi. Bayangkan dengan UU yang lama, anak muda pemakai masuk penjara berbaur dengan bandar, jadinya malah lebih terkontaminasi," papar Tamrin Dahlan lagi.

Menanggapi soal kesiapan BNN, Tarmin Dahlan mengatakan di BNN ada lima divisi. Salah satunya panti rehabilitasi yang dipimpin tiga direktur, masing-masing Direktur penguatan Lembaga Instansi Pemerintah, Direktur Penguatan Lembaga Komponen Pemerintah dan Direktur Pasca Rehabilitasi. "Nah tugas kami di Pasca Rehabilitasi sangat berat. Saya ada di hilir," ungkap Tamrin.

Berada di hilir yang dimaksud Tamrin karena yang ditangani adalah korban. "Di hulu-kannya ada orang yang belum kena sekitar 98%, yang sudah kena berdasarkan statistika sekitar 1,99% dengan jumlah 3,5 juta. Yang sudah terlanjur kena ini yang kami pulihkan," jelasnya lagi.



Kombes Pol Tamrin Dahlan

BNN sendiri sudah memiliki tempat rehabilitasi yang bagus dengan kapasitas 500 orang. Dari jumlah tersebut 350 di antaranya sudah terisi. Sedangkan satu hari di di seluruh Indonesia ada 40 orang meninggal.

“Yang belum terkena komplikasi akan kita jangkau. Terkadang dengan sedikit paksa. Terus yang sudah terlanjur tertangkap polisi kita beri bantuan hukum. Artinya, kita tidak intervensi tapi mencoba menjelaskan pada teman-temandi lapangan; Ini loh pasal 127-128,” urai Tamrin.

Tugas rehabilitasi sanhgat sulit karena tugas membawa korban bukanperkara mudah. Terlebih lagi masih ada paradigma lama. Copnotohnya, kata tarmin, ada telkepon dari tetangga tentang pecandu yang meresahkan kita bawa walaupun harus dibujuk. ‘Karena itu, saya minta tolong media untuk bantu sosialisasi bahwa Negara bertanggung jawab. Kalau ada tetangga yang terkena narkoba hubungi kami. Kita punya Dipa dan ada duit,” imbuh Tamrin bersemangat.

PERAN DOKTER

Sementara dr Djodi menjelaskan untuk mendapatkan fasilitas rehabilitasi harus ada permintaan dari keluarga untuk mohon direhabilitasi. “Perlu penanganan dokter karena untuk membuktikan apakah dia pecandu atau bukan perlu keahlian dokter,” kata Djodi.

Sementara, dr Kusman Sriakusumah menambahkan, untuk pertimbangan hakim, kata Jodi, diperlukansurat dari dokter. Hanya saja terkendala kurang sosialisasi. Karena dipengadilansurat dokter juga diperlukan sebagai alat bukti. Jadi tujuannya, pecandu dikasih situasi dan kondisi di mana dia bisa berubah.

“Sekarang ini, penanganannya berubah. Pendekatannya buykan lagi public security yang ditangkap kita lihat sebagai problem. Boleh dibilang sakit.. Yang menyembuhkan orang sakitkan dokter. Di sini ilmu kedokteran yang menangani. Yang paling dekat adalah psikiater,” ujar dr Kusman.

Seperti diketahui, Pemerintah dan DPR-RI menyetujui perubahan UU tindak pidana narkoba dari UU No. 8 tahun 1977 jadi UU No. 35 tahun 2009, yang sudah mulai diberlakukan pada 12 Oktober 2009.

UU No. 35 /2009 memberlakukan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan denda Rp10 miliar terhadap pengedar maupun pengguna yang membawa barang bukti psikotropika.

Pelaku yang membawa lebih dari lima gram narkoba



dr. DJodi dan dr. Kusman

kena ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar atau ditambah seper-tiga masa hukuman.

Selain itu UU No. 35 mengautus shabu sebagai psikotropika golongan satu sama halnya dengan kokain atau heroin atau mariuana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.

SURAT EDARAN

Surat edaran Ketua Mahkamah Agung (MA) No. 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalaguna, Korban Penyalagunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada Ketua

Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia menyebut antara lain jumlah barang bukti dan rehabilitasi rujukan.

Dalam butir b pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakain satu hari dengan rincian:

1.	Kelompok methamphetamine (shabu)	: 1 gram
2.	MDMA (ekstasi)	: 2,4 gram (8 butir)
3.	Heroin	: 1,8 gram
4.	Kokain	: 1,8 gram
5.	Ganja	: 5 gram
6.	Daun Koka	: 5 gram
7.	Meskalin	: 5 gram
8.	Psylosibin A	: 3 gram
9.	LSD	: 2 gram
10.	PCP	: 3 gram
11.	Fentanil	: 1 gram
12.	Metadon	: 0,5 gram
13.	Morfin	: 1,8 gram
14.	Petidn	: 0,96 gram
15.	Kodein	: 72 gram
16.	Bufrenorfin	: 32 mg

Surat-surat yang harus diajukan antara lain surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba sesuai permintaan penyidik, surat keterangan dokter/psikiater yang ditunjuk hakim, tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Sedangkan tempat rehabilitasi sesuai putusan rehabilitasi adalah tempat rehab BNN, RSKO Cibubur, RS Jiwa seluiruh Indonesia, panti Rehabilitasi Depkes dan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTB). [jt02]



IKATAN KELUARGA BESAR JAGRATARA

Sekretariat : Komplek Palm Pengadegan Blok C Nomor 24 Jakarta Selatan 12770 tel/Fax : 021-7981954

Mengucapkan

Selamat & Sukses

ATAS DILANTIKNYA

**BRIGJEN POL DRS. SUEDI HUSEIN, SH
SEBAGAI KAPOLDA RIAU**

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

*Selamat mengemban
tugas baru*



WAPRES PADA PERINGATAN HARI ANTI NARKOTIKA INTERNATIONAL

Jangan Ada Toleransi Pada Penyalahgunaan Narkoba



PEREDARAN dan penyalahgunaan narkotika serta obat terlarang di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan sehingga upaya pencegahannya harus lebih ditingkatkan. Masyarakat juga diharapkan jangan memberikan toleransi apa pun bila ada peredaran narkotika dan obat terlarang di lingkungan masing-masing.

Demikian pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono pada Peringatan Hari Anti Narkotika International di Monumen Nasional, Sabtu (26/6). "Saya tegaskan jangan pernah memberikan toleransi kepada penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat kita dan jangan biarkan lingkungan kita menjadi daerah penyebaran narkoba," kata Boediono seraya memberi penegasan bahwa upaya pemberantasan narkoba bukan hanya tugas aparat atau Badan Narkotika Nasional (BNN), melainkan membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat.

Semua elemen bangsa, ucapnya, pasti menyadari bahaya narkoba. Karena itu Wapres meminta semua pihak meningkatkan kewaspadaan atas meningkatnya kualitas

penyalahgunaan narkoba jenis sintesis kimiawi. Pasalnya, obat-obatan terlarang jenis itu mempunyai efek merusak yang lebih berbahaya.

Sementara dari sisi penanganannya, penyalahgunaan narkoba tidak bisa dilaksanakan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga perlu dukungan masyarakat, orang tua, politisi, olahragawan, hingga artis Boediono juga berpesan agar para orang tua lebih dekat secara emosional dengan putra-putri mereka. Sebab kedekatan hati dan emosi adalah benteng kukuh dalam memerangi penyalahgunaan narkoba.

Orang tua, kata Wapres, merupakan benteng utama dalam upaya pencegahan penggunaan narkoba pada putera-puterinya karenanya harus menjalin kedekatan emosional yang lebih kuat dengan putera-puterinya. Begitu juga dengan para publik figur seperti artis, atlet atau mungkin politisi, seyogyanya menjadi panutan bagi para idolanya, dengan memberikan contoh yang baik. "Menjadi tokoh panutan memang tak mudah karena kehidupannya selalu menjadi perhatian publik," ujar Wapres di akhir sambutannya.

Kekhawatiran terhadap peredaran narkoba juga diungkapkan oleh Kepala

Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Gories Mere yang hadir dalam perhelatan tersebut. Gories mengatakan bahwa berdasarkan survei BNN pada 2008 pecandu narkoba di Indonesia diperkirakan mencapai 3,3 juta jiwa (1,99% dari jumlah penduduk). Narkoba yang digunakan umumnya jenis sintetis, dimana usia pecandu berkisar 13-49 tahun. Tetapi jumlah terbanyak berusia 29 tahun atau usia produktif. Hal ini karena mereka sudah memiliki penghasilan sendiri. "Dari 3,3 juta itu, 2 juta pecandu bukan pelajar/mahasiswa, sisanya 1,3 juta pelajar/mahasiswa," jelasnya.

Kondisi tersebut, lanjut Gories, dimana jumlah pecandu kian bertambah, peredaran makin marak pihaknya optimis upaya pemberantasan peredaran narkoba terus berjalan dan upaya menyembuhkan para pecandu tetap saja ada. "Kecanduan narkoba bukanlah penyakit jadi penanganan yang dilakukan bagi mereka yang terjerat narkoba yang terbaik dengan terapi dan rehabilitasi. Saat ini ada 365 tempat rehabilitasi," jelas Gories seraya menyebutkan Indonesia saat ini memiliki panti rehab di 178 lokasi. 0 JT 02

DITLANTAS POLDA NTB

'NGEBUT' DENGAN GIGI EMPAT

DIREKTUR Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Kombes Pol Drs H Adnas, Msi mengatakan, pihaknya kini tengah meluncurkan empat program unggulan tahun 2010, dalam kaitan mendukung program quick wins Polri tahun 2010, dengan tujuan terciptanya kemitraan Ditlantas Polda NTB dan masyarakat.

Empat program tersebut, pengetahuan lalu lintas dalam kurikulum diklat Pemda NTB, Police Goes to Pesantren, Police Goes to Camp TNI dan program sekolah mengemudi bekerja sama dengan main dealer kendaraan bermotor.

Ini, artinya, tanpa menunggu waktu, Ditlantas Polda NTB 'ngebut' dengan porsneling (gigi) empat karena tak mau tertinggal dari Ditlantas Polda lain!

Seperti diakui H Adnas kepada Jagratara empat program tersebut

merupakan inovasi dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat NTB akan berlalu lintas. "Empat program ini merupakan bentuk komitmen kami terhadap program quick wins Polri dalam rangka membangun kemitraan Polri dan masyarakat," tandas H Adnas.

Secara rinci, Ditlantas memaparkan tentang rancangan program yang menjadi bagian dari inovasinya. Misalnya, program pengetahuan lalu lintas dalam kurikulum Diklat Pemda NTB, bertujuan memasukkan pendidikan pengetahuan lalu lintas dalam setiap pendidikan dan latihan yang dilaksanakan Pemda NTB. Pendidikan yang dimaksud, prajabatan CPNS, pendidikan untuk alih golongan, penataran guru/kepala sekolah, serta berbagai diklat yang diadakan Pemda.

"Pada jenis pendidikan-pendidikan



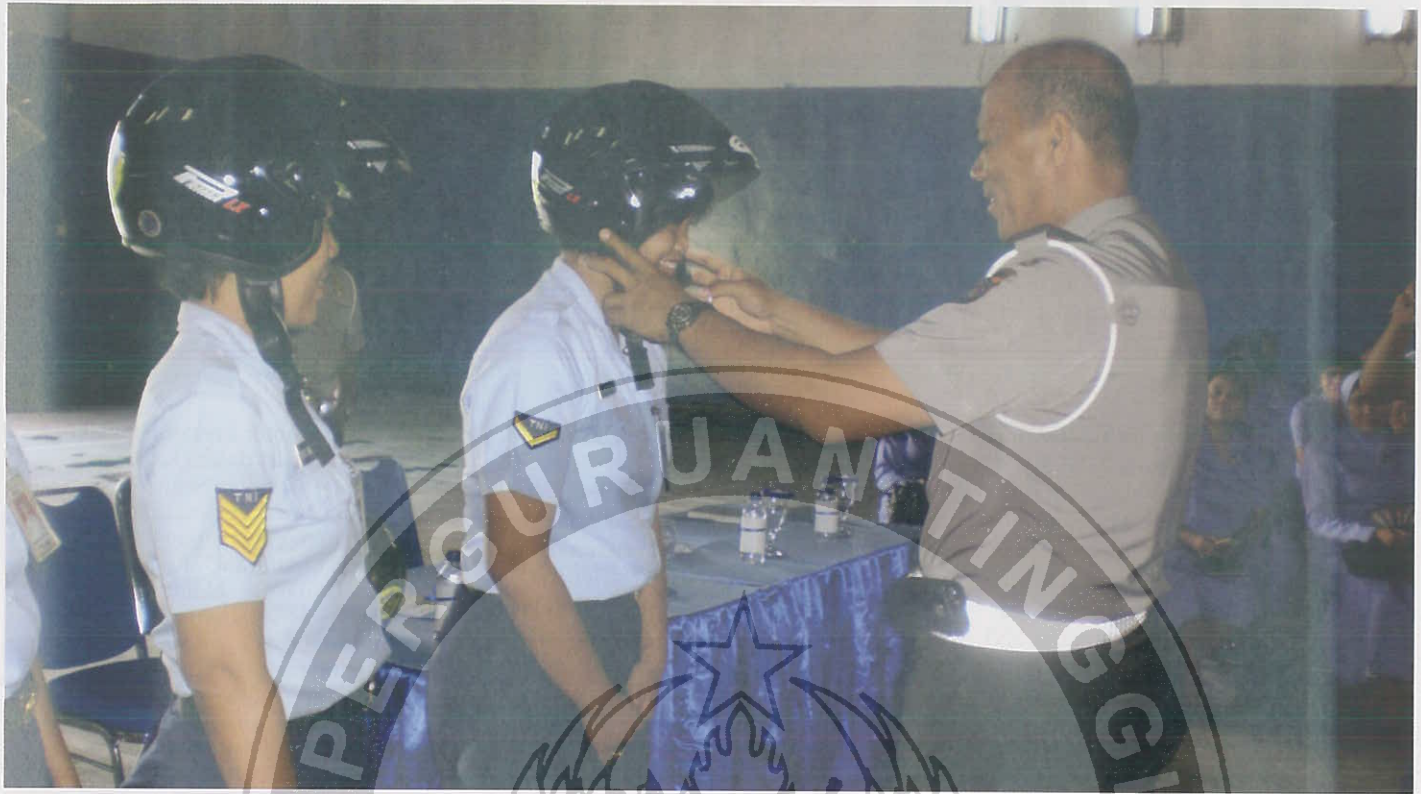
itu dan penataran pendidikan lalu lintas diperkenalkan secara luas," aku H Adnas. "Tujuannya menanamkan kesadaran berlalu lintas kepada PNS dan nantinya dapat ditularkan kepada masyarakat," tambahnya.

Sedangkan metode pendidikannya adalah pengetahuan tentang lalu lintas dan sosialisasi UU No.22/2009 tentang LLAJ.

"Kemudian, program police goes



Para undangan yang menghadiri kegiatan Ditlantas Polda NTB goes to Pondok Pesantren.



Penyerahan helm SNI oleh Dirlantas Polda NTB dalam program *Police goes to camp* TNI.

to ponpes merupakan kelanjutan program 100 hari kerja Ditlantas Polda NTB yang ditandai MoU antara Polda NTB dan para ulama pimpinan pesantren tentang pengetahuan lalu lintas dalam kurikulum pesantren dan kesediaan ulama ikut serta menanamkan kesadaran berlalu lintas," ungkap Dirlantas.

Sementara materi yang disampaikan, kata H Adnas, secara khusus memuat materi yang disesuaikan dengan metode yang digunakan. "Kami menyiapkan materi film tentang Tatib Lalin, film sosialisasi UU No. 22/2009, Perpustakaan Keliling, serta boneka Rintam untuk anak usia dini," katanya.

Tak kalah pentingnya program *police goes to camp* TNI. Program ini merupakan program lanjutan sosialisasi UU No. 22.2009 dan program 100 hari kerja Ditlantas Polda NTB dan karena adanya apresiasi dari Kepala satuan TNI terhadap peraturan lalu lintas. "Diharapkan anggota TNI juga dapat jadi agen menanamkan kesadaran kesadaran berlalu lintas di NTB," kata Adnas.

Pada program ini metode yang digunakan sangat simpel, yakni ceramah, Sosialisasi UU No, 22/2009, safety riding, kampanye kesadaran lalu lintas.

Program terakhir, kerjasama dengan dealer dilakukan dengan tujuan pembeli kendaraan dapat mengikuti sekolah mengemudi yang diselenggarakan main dealer dengan instruktur dari ditlantas.

"Kami harapkan pembeli kendaraan bermotor memiliki kemampuan mengemudi dengan baik sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas," kata Adnas menutup keterangan. jt02



WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA

IK Parwata Kusumah SH, MH

MENCAPRAK

Dirgahayu POLRI KE-64

MEMBANGUN KARAKTER MELALUI KEPEMIMPINAN YANG
UNGGUL, KEMITRAAN, PROFESIONALISME DAN ETIKA PRIMA



GERAKAN SEJUTA HELM SNI DI BUMI GORA

UPAYA MENEKAN TINGGINYA ANGKA KECELAKAAN DI NUSA TENGGARA BARAT

PENDOPO Gubernur Propinsi NTB Senin (24/6) pagi lalu riuh oleh rombongan pengendara sepeda motor yang umumnya generasi muda kota Lombok. Lengkap dengan perlengkapan helm standar SNI (Standar Nasional Indonesia) di kepala. Mereka membuat antrian panjang dan beriringan untuk bersiap-siap melakukan perjalanan mengelilingi kota Mataram. Mereka adalah peserta kegiatan "Gerakan Sejuta Helm SNI di Bumi Gora" yang digelar oleh Direktorat Lalulintas Polda NTB. Setelah bendera star dikibarkan, mereka pun bergerak perlahan meninggalkan pendopo gubernuran.

Nampak Gubernur NTB KH. M. Zainul Majdi diiringi Kapolda NTB Brigjen Pol Arief Wahyunadi, Kajati, Ketua PT, Danrem 162/WB, Danlanal, Danlanud dan unsur Muspida lainnya mengambil start di garis depan diikuti sejumlah anggota mulai dari Kepolisian, TNI hingga komunitas pecinta sepeda motor. Turut berpartisipasi Kepala Cabang Jasa Raharja NTB I Ketut Sudiasa beserta jajarannya yang langsung terlibat sebagai peserta konvoi keliling. Setelah memutar kota Lombok, para unsur muspida ini pun finish di Mapolda NTB.

Inilah untuk pertamakalinya dalam sejarah perlalulintasan Lombok, unsur Muspida, kapolda dan masyarakat

bersepeda motor bersama melakukan touring singkat dalam kegiatan bertema "Gerakan Sejuta Helm SNI di Bumi Gora dan Penanda tangan MoU tentang Pelayanan Drive Thru di Samsat Mataram". Kegiatan ini diramaikan oleh sekitar lima ribuan peserta yang semuanya mengenakan helm standar SNI, termasuk Gubernur NTB yang mengendari sepeda motor matik, tanpa boncengan. "Wah ini helmnya agak sempit, susah pasang kaca mata," kelakar gubernur saat memasang helm SNI yang diberikan Kapolda NTB Brigjen Pol Arief Wahyunadi.

"Gerakan Sejuta Helm SNI di Bumi Gora" merupakan sebuah program tentang kesadaran akan keselamatan berlalu lintas, yang dirangkaian



Penyerahan helm SNI dari Kapolda NTB kepada Gubernur NTB TGH. M Zainul Majdi dan anggota Muspida lainnya

Penandatanganan MoU tentang Pelayanan Drive Thru di Samsat Mataram sebagai wujud komitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan tingginya angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas menjadi latar belakang penyelenggaraan kegiatan ini.

"Inilah wujud tanggung jawab dan kepedulian Polda NTB terhadap masalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan tingginya angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas tersebut," jelas Kapolda NTB Brigjen Pol Arief Wahyunadi.

Selanjutnya, katanya, adalah sebagai tindak lanjut dari arahan pimpinan Polri dalam rangka Pelaksanaan Program Quick Wins tahun 2010, yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan menanamkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya tentang pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Tingkat kebutuhan manusia akan transportasi sepeda motor, lanjut Arief Wahyunadi, sangatlah tinggi, karena sepeda motor sangat menunjang aktivitas, terutama pada golongan generasi muda yang bermobilitas tinggi. "Jiwa muda dan mobilitas para generasi muda amat diutamakan, tetapi mereka belum mementingkan keselamatan jiwanya," tandas Arief Wahyunadi.

ANGKA KECELAKAAN DAN FATALITAS TINGGI

Pernyataan di atas, diamini oleh Dirlantas Polda NTB Kombes Pol Adnas Msi yang menyebutkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas dan data angka fatalitas akibat kecelakaan serta angka pertumbuhan kendaraan bermotor di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat angkanya cukuplah tinggi. Periode 2008 sampai dengan april 2010 jumlah kecelakaan mencapai 1697 kasus, dengan korban meninggal dunia 965 jiwa, sedangkan angka pertumbuhan kendaraan bermotor pada periode yang sama adalah 244036 kendaraan bermotor.

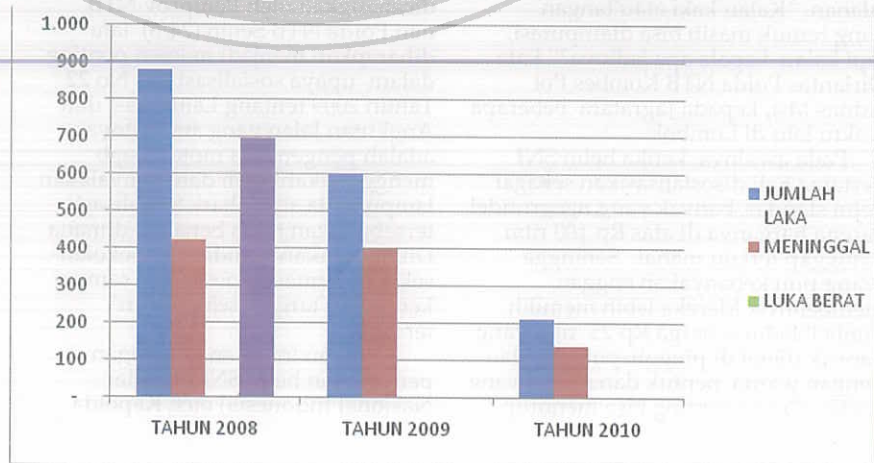
"Melihat data tersebut perlu suatu langkah nyata untuk mengatasi permasalahan tingginya angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas, satu langkah nyata yang mempunyai tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas," katanya seraya menambahkan bahwa touring ini merupakan sebuah kampanye untuk

menyuarakan gema disiplin berlalu lintas kepada pengendara untuk mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kombes Pol Adnas Msi juga menyatakan kelegaannya karena keinginannya mengajak masyarakat umum, baik di jajaran pemerintahan, pelajar dan mahasiswa, melakukan konvoi mengelilingi kota Mataram dengan menaati rambu-rambu lalu

lintas hari itu terwujud. "Kami bekerja sama dengan Pemprov NTB akan membuat kawasan di mana pengendara usia dini bisa secara bebas dapat berlatih mengemudikan kendaraan. Mudah-mudahan dengan adanya cikal bakal ini, gubernur dan wali kota bisa mensupport kami. Inilah bentuk tanggungjawab kami," pungkas Adnas.

JT 02



MAHALNYA HARGA SEBUAH KEPALA



Para Peserta kampanye Gerakan Sejuta Helm SNI melaksanakan Touring.

NILAI kepala manusia tentu tak patut disetarakan dengan barang apapun yang ada di dunia. Karena itu, melindungi dan menjaga kepala dari benturan benda-benda keras adalah urusan paling penting dari urusan yang terpenting. Tak terbayang kalau fungsi otak yang ada di kepala kita tak sempurna lagi, alias error, pasti kita pun tak lagi mampu berpikir sehat.

Jadi urusan melindungi kepala, terutama untuk para pengendara motor urusannya adalah wajib, tanpa ada kompromi. Berkendara tanpa menggunakan helm sebagai pelindung, sama halnya bermain-main dengan maut. Karena ketika terjadi kecelakaan di jalan entah tertabrak, atau menabrak, resikonya terbesar yang umumnya dialami pengendara motor adalah luka di kepala karena terbentur kerasnya batu atau aspal jalanan. "Kalau kaki atau tangan yang remuk masih bisa diamputasi, tapi kalau kepala apa jadinya?" kata Dirlantas Polda NTB Kombes Pol Adnas Msi, kepada Jagratara beberapa waktu lalu di Lombok.

Pada awalnya, ketika helm SNI pertama kali disosialisasikan sebagai helm standar, banyak yang ngegrundel karena harganya di atas Rp 100 ribu dianggap terlalu mahal. Sehingga orang pun kebanyakan enggan membelinya. Mereka lebih memilih membeli helm seharga Rp 25 ribu yang banyak dijual di pinggir-pinggir jalan dengan warna, bentuk dan model yang cantik. "Yang penting bisa menutup

kepala dan tidak ditilang polisi". Mereka seolah melupakan fungsi helm adalah melindungi kepala bukan sekedar penutup kepala.

Kalau bicara tentang harga helm standar SNI (Standar Nasional Indonesia) dibanding dengan helm-helman yang bukan standar memang jauh selisihnya. Uang untuk membeli helm standar jika dibelikan helm yang bukan standar dapatnya lima bahkan mungkin enam. Jadinya yang dibeli kuantitas dan bukan kualitas. Mereka lupa bahwa dalam ilmu ekonomi ada istilah "ada harga ada rupa". Helm bagus memang seringkali harus ditebus dengan harga yang mahal. Tapi harga itulah yg menjamin fungsinya akan bekerja dengan sangat baik yakni melindungi kepala.

TOURING singkat dengan tema "Gerakan Sejuta Helm SNI" yang dicanangkan oleh Pemprov NTB dan Polda NTB Senin (24/6) lalu diharapkan menjadi momen penting dalam upaya sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang amanatnya adalah pengendara motor wajib menggunakan helm dan menyalakan lampu pada siang hari. Sosialisasi tersebut akan terus berjalan, dimana Ditlantas akan mendatangi sekolah-sekolah termasuk pesantren sampai kemudian target "sejuta helm" tercapai.

Gerakan ini ditandai dengan penyerahan helm SNI (Standar Nasional Indonesia) oleh Kapolda

NTB, Brigjen Pol Arif Wachyunadi pada Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, Kajati NTB Slamet Wahyudi, Wali Kota Mataram HM Ruslan, Danlanal Mataram, Danlanud Mataram, Kepala Pengadilan Tinggi NTB Lalu Mariyun, Wakil Ketua DPRD NTB Suryadi Jaya Purnama dan sejumlah pejabat teras di jajaran muspida NTB. Selain itu, kapolda juga menyerahkan helm SNI pada para tuan guru.

Kapolda NTB Brigjen Pol Arief Wachyunadi mengatakan, gerakan tersebut merupakan bagian dari kampanye helm standar, yaitu helm SNI. "Hari ini kita mensosialisasikan dan menghimbau, kalau belum dipakai, ya harus dipakai," katanya.

Sementara Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi, MA mengatakan, pengendara sepeda motor memang harus mengenakan helm yang memenuhi SNI. Kenapa, karena helm berstandar SNI ada kualitas-kualitas tertentu sehingga ketika kecelakaan bisa memproteksi dengan maksimal.



Secara umum gerakan sejuta helm ini juga membantu dalam rangka menciptakan tertib berlalu lintas. Sebab di NTB seiring perkembangan ekonomi ruas jalan ruas jalan tidak seimbang dengan pertambahan kendaraan bermotor sehingga menciptakan kerawanan-kerawanan. Namun kerawanan tersebut bisa diminimalisir kalau pengendara bertanggungjawab, termasuk dengan menggunakan alat-alat pengaman seperti diamanatkan undang-undang. "Kita harapkan kejadian kecelakaan lalu lintas bisa ditekani, sehingga tidak ada kerugian baik itu harta dan jiwa serta dampak sosial," ujarnya.



IKATAN KELUARGA BESAR JAGRATARA

Sekretariat : Komplek Pusat Pengadegan Blok C Nomor 24 Jakarta Selatan 12770 Tel/Fax : 021-7991954

Mengucapkan

Selamat & Sukses

ATAS DILANTIKNYA

BRIGJEN POL DRS. SUEDI HUSEIN, SH SEBAGAI KAPOLDA RIAU

BRIGJEN POL DRS. RONNY FRENGKY SOMPIE, SH, MH SEBAGAI KARO ORTALA SDERENBANG POLRI

KOMBES POL DRS. KODIRUN KARYA SEBAGAI KABAG JIANLING ROJIANSTRA SDEOPS POLRI

KOMBES POL DRS. YOHANES WARDOYO SEBAGAI KARO LOG POLDA KALTENG

KOMBES POL DRS. SUDIARNO, SH SEBAGAI KEPALA PUSAT STUDI MANAJEMEN KEAMANAN DIT JIANBANG SESPIM POLRI

KOMBES POL DRS. MARULI WAGNER DAMANIK MAP SEBAGAI DIR SAMAPTA POLDA METRO JAYA

KOMBES POL DRS. MUHAMMAD NURJAJADI SEBAGAI KARO BINAMITRA POLDA SULSEL

KOMBES POL DRS. BUDI SUSILO SEBAGAI PENYIDIK UTAMA TK II DIT VI / TIPITER BARESKRIM POLRI

KOMBES POL DRS. SYAHRONI SEBAGAI KARO LOG POLDA SUMBAR

KOMBES POL DRS. WADIYANA HERMANA SEBAGAI KABAG JIANLAT DIT BINLAT LEMDIKLAT POLRI

KOMBES POL DRS. MAMAN NULYA KARNAMA SEBAGAI SES RODALPERS SDE SDM POLRI

KOMBES POL DRS. SISTERSINS NAMADOA SEBAGAI KARO PROGAR SDERENBANG POLRI

KOMBES POL DRS. M. IMAM DIAUHARI SEBAGAI KABAG JAKUN ROJAKSTRA SDERENBANG POLRI

KOMBES POL DRS. ACHNAD LUMUMBA, SH SEBAGAI IRWASDA POLDA JAMBI

KOMBES POL DRS. JOHNIPOL LATUPERRISA SEBAGAI SES ROLITBANG SDERENBANG POLRI

KOMBES POL DRS. NIXON MANURUNG SEBAGAI PAMEN BARESKRIM POLRI (DALAM RANGKA LEMHANAS)

KOMBES POL DRS. HARWIYANTO, SH, MM SEBAGAI PAMEN BARESKRIM POLRI (DALAM RANGKA LEMHANAS)

KOMBES POL DRS. YOHANES AGUS MULYONO SEBAGAI PAMEN POLDA METRO JAYA (DALAM RANGKA LEMHANAS)

KOMBES POL DRS. DEDI SUTARYA SEBAGAI PAMEN POLDA METRO JAYA (DALAM RANGKA LEMHANAS)

KOMBES POL DRS. BAMBANG HERU WISHOYO, SH SEBAGAI PAMEN POLDA SUMBAR (DALAM RANGKA LEMHANAS)

KOMBES POL DRS. MOCHAMMAD HENDRO SEBAGAI PAMEN POLDA SULSEL (DALAM RANGKA LEMHANAS)

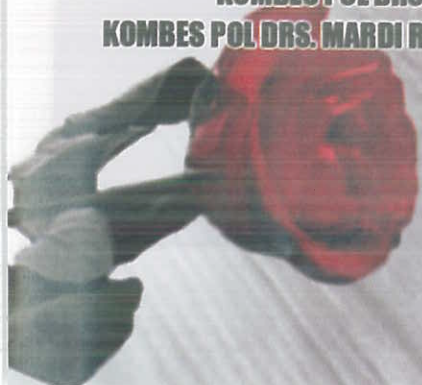
KOMBES POL DRS. ELDI AZWAR, SH, MAP SEBAGAI PAMEN DIV PROPAM POLRI (DALAM RANGKA DIK LEMHANAS)

KOMBES POL DRS. M. WAHYU HIDAYAT SEBAGAI PAMEN POLDA SULTENG (DALAM RANGKA DIK LEMHANAS)

KOMBES POL DRS. SETYO PRIHADI PAMEN POLDA JATIM (DALAM RANGKA DIK LEMHANAS)

KOMBES POL DRS. MARDI RUKMIANTO SH SEBAGAI PAMEN BARESKRIM POLRI (DLM RANGKA DIK LEMHANAS)

*Selamat mengemban
tugas baru*





BHAYANGKARI NUSA TENGGARA BARAT

TAK SEKADAR SIBUK URUS SUAMI

Bila ada lahan kosong yang secara tiba-tiba berubah fungsi menjadi Warung Hidup dan Apotik, itu pasti ulah dari ibu-ibu Bhayangkari Pengurus Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), yang gak bernah betah berdiam diri. Ada-ada saja yang diperbuat. Tapi, tentunya yang positif dan bermanfaat untuk banyak orang, kata Tanti Arif Wahyunadi, Ketua Bhayangkari PD NTB.

DALAM keteranganya kepada Jagratara, Tanti Arif Wahyunadi menyebutkan mengubah lahan kosong menjadi lebih berarti menjadi bagian kegiannya Bhayangkari yang mengacu pada program kerja pengurus pusat, yang disesuaikan dengan situasi, kondisidan kemampuan pengurus setempat.

“Ini hanya bagian kegiatan yang kami lakukan. Masih banyak lagi kegiatan yang telah tercover baik yang sifatnya sosial maupun pendidikan,” tambahnya.

Tanti Arif Wahyunadi menyebut paling sedikit da 12 kegiatan yang telah dilakoninya bersama ibu-ibu Bhayangkari jajaran Polda NTB.

Misalnya, yang baru-baru ini dilakukan adalah mengikut sertakan anggota Bhayakari dalam kegiatan pelatihan guru PAUD yang dilaksanakan oleh Organisasi Wanita Islam NTB. “Kegiatan ini yang berkaitan dengan pendidikan. Ada lagi yang kami lakukan, seperti kursus singkat membuat kue bekerja sama dengan SMK 4 Mataram, praktik memasak di Hotel Jayakarta Senggigi. Kami juga mensertakan anggota dalam pelatihan menata dan merias kue





oleh BKOW Provinsi NTB," terang Tanti Arif Wahyunadi.

Selain kegiatan yang intinya menambah ilmu pengetahuan tersebut, Bhayangkari PD NTB juga kerap mengadakan ceramah pengelolaan keuangan keluarga, mengadakan ceramah gizi manula dan ceamah bertema membaca potensi diri dengan sidik jari.

Tak luput pula kegiatan budaya. Untuk kegiatan tersebut Bhayangkari PD NTB tak jarang melaksanakan kunjungan budaya ke tempat-tempat berpotensi menambah wawasan dan kecintaan terhadap seni dan budaya. Misalnya kunjungan ke tempat keajinan tenun di Pringgasela, kerajinan anyaman Ketak, Air terjun Otakoko, Museum NTB, kerajinan Tembikar Labuapi, Pura Mayura dan melaksanakan kunjungan dan kegiatan sosial di Kampung Suku Adat Suku sasak Dusun Sade.

"Kegiatan yang bersifat olah raga pun kami lakukan secara rutin. Tiap Selasa kami bergabung dengan Polwan untuk latihan Tari Pergaulan, dan kegiatan olah raga lain yang berdasarkan undangan dinas maupun undangan organisasi lain," kata Tanti.

Mengingat masyarakat NTB

termasuk masyarakat agamis, Bhayangkari PD NYB juga berbaur dengan kelompok pengajian rutin ceramah dan membaca Alqur'an. Termasuk di dalamnya pengurusan jenazah, dan shalat tasbih.

"Kami juga melakukan olah bakti kepada anggota dengan

memberikan kesempatan mengelola konsumsi jika ada kegiatan interen," tambah Tanti.

Jadi, kegiatan wanita berseragam jingga tersebut memang banyak. Mereka tak hanya sekedar sibuk mengurus suami. (jt02)

